PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI

(Studi Empiris Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan)

SKRIPSI

Oleh

SEPTINIAR DWI KURNIAWATI

NIM: G72219071



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

PERNYATAAN

Saya, Septiniar Dwi Kurniawati, G72219071, menyatakan bahwa:

- Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemdian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, II APril 1023

METERAL TEMPEL TEMPEL 3726AXX350383556

Septiniar Dwi Kumiawati NIM, G72219071 Surabaya, 10 April 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

Ashari Lintang Yudhanti, SE, MAK

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI

(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULUNGAN)

Olch

Septiniar Dwi Kurniawati

NIM: G72219071

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada

tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

- Ashari Lintang Yudhanti, SE, MAK NIP. 199411082019032021 (Penguji 1)
- Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP NIP. 198308082018012001 (Penguji 2)
- Ade Irma Suryani Lating NIP.199110012019032020 (Penguji 3)
- Saqofa Nabilah Aini, S.E.,M.Sc. NIP. 199301092020122028 (Penguji 4)

Tanda Tangan

Harang M

Fell -

Surabaya, 25 Mei 2025

Dekan,

jul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I NIP. 1970051420000310014



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai siyitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Septiniar Dwi Kurniawati
NIM	: G72219071
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address	
UIN Sunan Ampe	agan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
	TH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BASI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULUNGAN)".
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/merakademis tanpa penulis/pencipta d	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
2	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta n saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 8 Juni 2023
	Penulis
	Jump.
	(Septiniar Dwi K)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap kinerja organisasi. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip *Good Governance* pada penelitian ini. Menurut World Bank menyatakan bahwa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 49 staff/pegawai pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penyebaran angket dan skala likert menjadi alat yang digunakan dalam pengukuran indikasi. Kemudian analisis data penelitian ini menggunakan Uji-t dan Uji-F dengan menggunakan aplikasi SPSS 26.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh hipotesis yang ada dinyatakan diterima, yaitu "Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan". Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis bahwa Good Governance mempengaruhi Kinerja Kantor Samsat Kabupaten Bulungan secara positif dan signifikan. Hal tersebut tentunya akan semakin mewujudkan praktek pelayanan publik yang syarat akan prinsip-prinsip Good Governance.

Kata kunci: *Good Governance*, kinerja organisasi



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing Good Governance on organizational performance. Participation, transparency and accountability are the principles of Good Governance in this study. According to the World Bank, participation, transparency and accountability are needed by the government, because based on this information it becomes material for government decision making to make management improvements in the implementation of better government affairs.

This study uses a quantitative approach using saturated sample method. The number of respondents in this study were 49 staff/employees at the Bulungan District SAMSAT Office. Data collection techniques by distributing questionnaires and a Likert scale are the tools used in measuring indications. Then the analysis of the research data used the t-test and F-test using the SPSS 26 application.

Based on the results of multiple linear regression tests, the existing hypothesis was declared accepted, namely "Good Governance affects Organizational Performance at the Bulungan District Samsat Office". So it can be concluded based on the analysis that Good Governance influences the performance of the Bulungan District Samsat Office positively and significantly. This of course will further realize the practice of public service which requires the principles of Good Governance.

Keywords: Good Governance, organizational performance



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Stewardship Theory	23
2.1.2 Good Governance	25
2.1.3 Kinerja Organisasi	30
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Pengembangan Hipotesis	41

2.4 Kerangka Konseptual.	45
BAB 3 METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.4 Variabel Penelitian	
3.5 Definisi Operasional	49
3.6 Jenis dan Sumber Data	53
3.6.1 Jenis Data	53
3.6.2 Sumber data	53
3.7 Teknik Pengumpulan Data	53
3.8 Teknik Analisis Data	
3.8.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	
3.8.2 Asumsi Klasik	54
3.8.3 Uji Hipotesis	55
BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Sejarah Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan	58
4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Janji Organisasi	60
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan	62
4.2 Hasil Pengumpulan Data	62
4.2.1 Karakteristik Responden	63
4.3 Analisis Data	64
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	64
4.3.2 Hii Validitas Product Moment	66

4.3.3 Uji Reliabilitas	68
4.4 Uji Asumsi Klasik	70
4.4.1 Uji Normalitas	70
4.4.2 Uji Multikolonieritas	71
4.4.3 Heteroskedastisitas	72
4.5 Uji Hipotesis	74
4.5.1 Uji Regresi Linear Berganda	74
4.5.2 Uji T	75
4.5.3 Uji F	77
4.5.4 Uji koefisien Determinasi (R²)	78
4.6 Pembahasan	79
BAB 5 PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	35
Tabel 3.1 Operasional Variabel	50
Tabel 3.2 Skala Likert	52
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner	63
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Umur	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi (X1)	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas <mark>Varia</mark> bel <mark>Trans</mark> paransi (X2)	69
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabili <mark>tas</mark> Var <mark>ia</mark> be <mark>l A</mark> kuntabilitas (X3)	69
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabili <mark>ta</mark> s V <mark>ariabel K</mark> iner <mark>ja</mark> Organisasi (Y)	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas	71
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4.14 Hasil Uji T	76
Tabel 4.15 Hasil Uji F	77
Tabel 4.15 Hasil Uji F Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)	78

SURABAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan	62
Gambar 4. 2 Grafik Scaetterplot	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian	94
Lampiran 3 : Tabulasi Data	97
Lampiran 4 · Hasil Uii SPSS	100



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama di Indonesia dalam pemerintahan daerah dengan era baru dan desentralisasi fiskal. Akuntabilitas lembaga sektor publik untuk kepentingan publik merupakan suatu keharusan dalam akuntansi sektor publik. Sektor publik adalah lembaga yang menyediakan pelayanan publik yang utama di Indonesia. Sektor publik juga merupakan instrumen hukum yang mengimplementasikan kebijakan sosial. Adanya otonomi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mereformasi sistem daerah.

Keputusan MPR No. XV/MPR/1998 mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa aturan, pengalokasian, pemerataan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan yang menjadi dasar hukum penetapan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 22 tahun 1999 "Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah untuk mengatur dan mengurus penduduknya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan keinginan penduduknya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah sudah diganti disempurnakan dan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Kedua undang-undang ini mengubah pertanggungjawaban

pemerintah dari pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat) menjadi pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh DPR). Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk dapat menjelaskan hasil-hasilnya kepada publik (Sudiarsana & Dwiana, 2018).

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas oleh suatu badan atau instansi pemerintah mampu mendukung peningkatan kemakmuran warga sebab layanan publik yang diberikan merupakan contoh kriteria keberhasilan suatu organisasi pemerintah itu sendiri (Anggraini & Idayati, 2022).

Mengukur kinerja pemerintahan sangatlah penting, karena kinerja yang terukur dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memungkinkan pembangunan daerah mecapai tujuannya. Kinerja adalah hasil yang dicapai seorang pegawai atau karyawan dalam mencapai tujuan instansi yang telah ditetapkan. Peran pegawai sangat penting dan membantu instansi untuk berkembang. Ketika karyawan melakukan tugasnya dengan baik dan benar, maka akan mempengaruhi kinerja intansi atau organisasi tersebut.

Keterkaitan antar ruang lingkup organisasi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti *Good Governance*, mampu meningkatkan peluang

sebuah organisasi publik untuk berjalan efektif. Menurut (Anggraini & Idayati, 2022) *Good Governance* adalah pelaksanaan otoritas atau penggunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan adminstrasi untuk mengelola berbagai urusan publik pada semua tingkatan guna menciptakan kondisi kesejateraan sosial, integritas, dan kohesi sosial, yang merupakan instrumen kebijakan publik.

Tanjung Selor merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bulungan adalah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan pelayanan yang baik. salah satu aspek mendasar dalam menerapkan gagasan tata pemerintahan yang baik adalah dengan penerapan konsep *Good Governance*. Implementasi praktik tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sistematis berdasarkan pada kapastitas pemerintah, masyarakat, dan prosedur pasar. Penyediaan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis dalam mewujudkan *Good Governance*.

Samsat, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan STNK, penyelenggaraan kecelakaan lalu lintas, angkutan jalan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, merupakan pelayanan yang diberikan di kantor samsat mengacu pada UU Republik Indonesia 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah signifikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan membangun kesejahteraan

masyarakat Indonesia. warga negara membayar pajak, yang kemudian menjadi salah satu komitmen yang harus dijunjung tinggi. Peningkatan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak daerah. Salah satu dari berbagai daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang cukup besar.

Jumlah penduduk di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan, maka kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat, terbukti dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebesar 7% atau 21.772 kendaraan pada tahun 2020. Kendaraan bermotor juga mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan, dengan pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 4% dari tahun ke tahun seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Pajak kendaraan adalah 77,5 M pada akhir tahun 2019, dan target tahun 2020 adalah sebesar 99 M (Sidara, 2020).

Fenomena yang berkaitan dengan penerapan *Good Governance* pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan ini masih perlu diperhatikan lebih baik, jika hal tersebut diabaikan maka kinerja pada kantor Samsat Kabupaten Bulungan akan menurun. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, semakin meningkatnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor maka tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban publik terhadap kinerja Kantor samsat semakin berkembang, namun di era digital saat ini masih terdapat karyawan yang kurang teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya, terbukti dengan adanya kesalah pada penulisan surat-surat

kendaraan, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai untuk mengoperasikan komputer masih lemah. Kemudian kondisi pelayanan masyarakat yang tampaknya kurang diperhatikan secara serius, terbukti dengan lama dan rumitnya pihak samsat untuk melayani masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga kurang memperhatikan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelayanan agar layanan dapat menjangkau ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

Berdasarkan fenomena di atas membuktikan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai dan masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Kantor Samsat Kabupaten Bulungan yang masih harus diperbaiki untuk menigkatkan mutu kualitas indikator kinerja tersebut. Tingginya tuntutan masyarakat akan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi, Kantor Samsat harus mampu menghasilkan kinerja yang baik untuk menciptakan *Good Governance*. Sejumlah penelitian memberikan bukti bahwa dampak *Good Governance* yang baik terhadap kinerja organisasi memiliki pengaruh yang menguntungkan pada kemajuan dan transformasi pada masyarakat.

Menurut World Bank, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diperlukan karena berdasarkan data tersebut pemerintah dapat melakukan perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik. Penerapan *Good Governance* sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi (Simbolon, 2022). Selain itu alasan peneliti

memilih prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas adalah karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten dari setiap variabel tersebut.

Terdapat perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya oleh Nurleli Rahma Fadhila (2021), yang menemukan bahwa penerapan *Good Governance* mampu mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan. Sejalan dengan penelitian Muhammad Dahlan dan Asep Sumaryana (2017), yang menyebutkan jika penerapan *Good Governance* memiliki penaruh positif dan signifikan pada kinerja organisasi. Sedangkan menurut Susanto (2015), *Good Governance* terbukti tidak mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan latar belakang dan terdapat perbedaan temuan studi sebelumnya para peneliti secara alami ingin mengidentifikasi mengenai penerapan *Good Governance* apakah mampu mempengaruhi kinerja kantor Samsat Kabupaten Bulungan secara positif, yang tentunya mendorong para akademisi untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul "Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan)".

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan?
- 2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan?

3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan memahami apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.
- Untuk mengetahui dan memahami apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.
- Untuk mengetahui dan memahami apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi peniliti, untuk memperdalam pemahaman penulis tentang bagaimana implementasi Good Governance terhadap kinerja organisasi yang dihasilkan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.
- Bagi instansi, sebagai sumbangsih gagasan, fakta, dan isi yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja pada instansi tersebut.
- 3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang

- pengaplikasian *Good Governance* pada kinerja dalam organisasi sektor publik.
- 4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatan kemampuan daya saing dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Teori yang dikemukakan oleh Donaldson et al. ini, merupakan teori utama yang mendasari penilitian ini (1997). Stewardship theory menguraikan suatu kondisi dimana manajemen lebih dimotivasi oleh hasil, terutama untuk kepentingan organisasi, dan bukan oleh kepentingan individu (Sukarta et al., 2017). Agency theory memperkenalkan mekanisme kontrol yang menghasilkan kewajiban tambahan, sedangkan stewardship theory memperkenalkan pembentukan kepercayaan, yang merupakan perbedaan utama antara dua teori dalam hal menejemen risiko (Jefri, 2018).

Organisasi pemerintah dan penelitian akuntansi sektor publik lainnya, *stewardship theory* telah diterapkan secara luas. Morgan merupakan salah satu peneliti yang menggunakan teori ini pada tahun 1996, selain itu terdapat juga peneliti lain yang juga menggunakan teori ini, diantaranya van Slyke (2006), dan Thorton (2009) sedangkan untuk organisasi nirlaba yaitu Vargas pada tahun 2004, Caers Ralf pada tahun 2006 dan Wilson pada tahun 2010. Menurut pengertian ini, pejabat publik harus melakukan tugas (bertindak sebagai *steward*) untuk kepentingan *principal* yaitu

masyarakat. Sejak awal, akuntansi sektor publik telah direncanakan untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk mendukung hubungan antara *steward* dan *principal* sudah tersedia. Selain berusaha untuk menjaga kepercayaan publik, untuk memastikan ketersediaan informasi. Pelayanan terbaik harus diberikan *steward* kepada *principal*. Akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya diperlukan untuk menegakkan kepercayaan dan membangun kondisi pelaporan yang menguntungkan. *Stewardship Theory* dalam akuntansi menjelaskan bahwa bentuk kepemimpinan dan struktur hubungan yang ada antara eksekutif dan manajer bawahan dalam organisasi memiliki beberapa perbedaan, perbedaan tersebut adalah budaya organisasi dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama tanpa menghambat kepentingan individu (Jefri, 2018).

Teori stewardship ini telah diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik untuk mengurangi risiko manajemen. Akuntansi sektor publik sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara steward dengan prinsipal, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan prinsipal sebagai pemilik sumber daya menjalin kesepakatan dengan kepercayaan dan tanggungjawab sesuai tujuan organisasi. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya (prinsipal)

menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada pihak manajemen (steward) (Dharu, 2021). Penerapan strewardship theory terletak pada peran pemerintah daerah sebagai steward harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai principal. Pemerintah daerah harus dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Amanah yang telah diberikan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan principal. Jika pemerintah belum bisa melaksanakan kewajiban atau amanah tersebut maka pemerintah harus melaksanakan sampai kewajiban terwujud untuk kepentingan principal dan meningkatkan kepercayaan publik.

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Secara umum, *Good Governance* didefinisikan sebagai kepemimpinan yang baik dalam perusahaan yang berlandaskan pada etika bisnis/kerja. Menerima nilai suatu sistem aturan atau tata kelola yang baik untuk mengendalikan interaksi, tanggung jawab, dan kepentingan berbagai pihak dalam kegiatan perusahaan dan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk dari *Good Governance* (Sunardi et al., 2019).

Pemerintahan yang baik sering juga bentuk lain dari Good Governance. Pada konsepnya, kata "baik" dalam konteks "tata pemerintahan yang baik" (atau "tata pemerintahan yang baik") mencakup dua pengertian: pertama, nilai-nilai yang mendukung keinginan atau kehendak rakyat, nilai-nilai yang mampu membuat kemampuan msyarakat meningkat dalam upaya mewujudkan sikap mandiri, kelangsungan pembangunan, serta keadilan bagi semua orang. Kedua, komponen pelaksanaan pemerintahan yang mampu melakukan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Anggraini & Idayati, 2022).

World Bank mendefinisikan Good Governance sebagai penerapan manajemen pembangunan akuntabel yang sejalan dengan cita-cita demokrasi dan pasar yang efektif, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik di bidang politik maupun administrasi, menegakkan disiplin anggaran, dan membangun kerangka hukum dan politik untuk memperluas kegiatan bisnis.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Menurut UNDP, terdapat interaksi yang positif dan sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat

9 komponen utama dari *Good Governance*, di antaranya: (Renyowijoyo, 2010):

1. Partisipasi (Participation)

Semua masyarakat berhak secara langsung maupun tidak untuk menentukan bagaimana suatu pilihan dibuat, melalui mediasi lembaga-lembaga terkemuka yang menjadi wakil masyarakat. Landasan keterlibatan tersebut adalah kebebasan berserikat, berbicara, dan partisipasi konstruktif. Partisipasi memiliki beberapa indikator, yaitu:

- a. Terdapat forum perwakilan dengan pedoman yang jelas dan terbuka untuk memungkinkan keterlibatan masyarakat.
- b. Kapasitas masyarakat dalam melibatkan dirinya pada penambilan keputusan.

2. Hukum (Fairness)

Hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya harus diterapkan tanpa pandang bulu dan adil dalam sistem peradilan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Landasan transparansi adalah aliran informasi yang tidak terbatas yang dapat langsung diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Sebuah

informasi haruslah bisa untuk dipahami dan diamati. Transparansi memiliki beberapa indikator, diantaranya:

- a. Memberikan informasi rinci tentang proses,
 biaya, dan kewajiban.
- Membuat proses pengaduan jika hukum dilanggar atau kasus suap.
- c. Bekerja sama dengan media dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan arus informasi.

4. Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga harus berupaya untuk melayani semua pemangku kepentingan melalui mekanisme kelembagaan.

5. Orientasi (Consensus Orientation)

Dari segi kebijakan dan prosedur, *Good Governance* berfungsi sebagai perantara antara
berbagai kepentingan untuk mendapatkan hasil
terbaik bagi kepentingan yang lebih besar.

6. Keadilan (*Equity*)

Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraannya.

7. Efektivitas (*Effectivness*)

Tahapan pada suatu lembaga dalam menghasilkan sesuatu, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan sipil harus bertanggung jawab kepada institusi kelompok pemangku kepentingan. Apakah keputusan diambil secara internal oleh perusahaan atau tidak, akuntabilitas ini didasarkan pada organisasi dan jenis keputusan yang dibuat. Akuntabilitas memiliki beberapa indikator, di antaranya:

- a. Bagi mereka yang membutuhkannya,
 prosedur pembuatan dilakukan secara tertulis
 sehingga dapat diakses.
- Kejelasan tujuan aturan yang telah dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi serta dengan kaidah administrasi yang baik.
- c. Prioritas dan tujuan operasional yang realistis dan konsisten.

d. Menurut peraturan perundang-undangan yang relevan, pertanggungjawaban telah diberikan secara berkala..

9. Strategi Visi (Strategic Vision)

Untuk mencapai pembangunan semacam ini, para pemimpin dan masyarakat luas harus memiliki pandangan yang luas dan komprehensif tentang *Good Governance* dan pembangunan manusia.

2.1.3 Kinerja Organisasi

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan output dari seberapa berhasil seseorang atau organisasi untuk menyelesaikan tugasnya pada jangka waktu tertentu. Kinerja juga dapat dilihat sebagai keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Keefektifan manajemen dalam memberikan operasional lembaga mampu mendorong upaya peningkatan kinerja. Setiap upaya manajemen kinerja dimaksudkan untuk digunakan untuk mendukung kinerja pada tingkat terbesarnya di dalam setiap organisasi (Aditama & Widowati, 2017).

Menurut (Kasni et al., 2018), "Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi".

2.1.3.2 Pengertian Kinerja Organisasi

Pencapaian tujuan atau sasaran organisasi pemerintah berdasarkan pengembangan visi, misi, dan strategi organisasi disebut sebagai kinerja organisasi pemerintah dan mencerminkan seberapa berhasilkah suatu lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku (Dharmawan & Supriatna, 2016).

Kinerja organisasi adalah apa yang telah diperoleh selama periode waktu tertentu dalam hal input, output, hasil, manfaat, dan efek. Arah pengelolaan organisasi pemerintahan dapat difasilitasi oleh hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dengan menjalankan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang berkaitan dengan input, output, outcome, benefit, dan impact with responsibility. Peningkatan kinerja yang efektif dan efisien akan muncul dari adanya hasil kerja yang dihasilkan oleh instansi dengan penuh tanggung jawab (Alamsyah, 2018).

2.1.3.3 Indikator Kinerja Organisasi

Menurut Agus Dwiyanto dalam penelitian (Aditama & Widowati, 2017), menyebutkan bahwa untuk mengukur

kinerja lembaga publik, terdapat beberapa indikator yang digunakan, yakni:

1. Produktivitas

Gagasan produktivitas mengacu pada konsep yang mengukur efektivitas dan tingkat efisiensi. Rasio input ke output adalah cara umum untuk menentukan produktivitas. *General Accounting Office* (GAO) telah melakukan pengembangan dengan membangun ukuran produktivitas yang lebih luas dengan mempertimbangkan seberapa banyak pelayanan publik mencapai hasil yang diinginkan sebagai indikator kinerja yang penting. Hal itu dilakukan karena dirasa konsep produktivitas terlalu sempit.

2. Kualitas Layanan

Saat mengevaluasi kualitas layanan, masyarakat umum atau pengguna layanan akan mengeluarkan informasi yang menjadi sumber data utama. Pentingnya isu kualitas pelayanan dalam menganalisis kinerja organisasi pelayanan publik cenderung berkembang dari waktu ke waktu. Ketidakpuasan publik dengan tingkat layanan yang diperoleh dari organisasi publik merupakan

kontributor utama buruknya persepsi masyarakat terhadap mereka.

3. Responsivitas

Untuk menentukan prioritas pelayanan dan membuat program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat, suatu organisasi harus mampu mengenali tuntutan masyarakat. Hal tersebutlah yang disebut sebagai responsivitas. Karena responsivitas secara langsung mencirikan kapasitas organisasi publik untuk memenuhi tujuannya, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, membuat responsivitas termasuk dalam indikator kinerja. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

4. Responsibilitas

Tanggung jawab mengacu pada apakah tindakan organisasi publik telah dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi atau prinsip-prinsip administrasi yang benar. Dengan membandingkan

pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan proses dan ketentuan organisasi di dalam organisasi, hal ini dapat dievaluasi melalui telaah dokumen dan laporan kegiatan organisasi.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah sejauh mana otoritas publik yang dipilih oleh masyarakat umum mampu mempengaruhi keputusan dan tindakan lembaga publik. Asumsinya, karena para politisi ini dipilih oleh pemilih, sehingga mereka akan selalu mewakili kepentingan pemilihnya (masyarakat). Pada lingkup ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai – nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Landasan atau titik acuan berupa hipotesis atau pengamatan berdasarkan temuan berbagai penyelidikan sebelumnya sangat diiperlukan, yang dapat digunakan sebagai data pendukung. Kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik-topik dan disajikan dalam penelitian ini merupakan salah satu informasi pendukung yang menurut pendapat peniliti harus dituangkan dalam bagian tersendiri. Kinerja organisasi telah menjadi subjek penelitian sebelumnya di bidang ini. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tahapan penelitian dari sejumlah temuan penelitian sebelumnya dari berbagai sumber.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Peneliti		Penelitian	
1.	Ida Ayu	"Pengaruh	Metode	hasil penelitian ini
	Arina	Penerapan Prinsip-	purposive	menunjukkan
	Mahadewi	Prinsip Good	sampling,	bahwa
	dan I G. A.	Governance	Teknik analisis	transparansi,
	M. Asri	Terhadap Kinerja	data yang	akuntabilitas,
	Dwija Putri	Pada Rumah Sakit	digunakan	responsibilitas,
	(2019)	Di Kota Denpasar"	adalah analisis	independensi,
			regresi linear	serta kewajaran
			berganda.	berpengaruh
				positif terhadap
				Kinerja pada
				Rumah Sakit di
				Kota Denpasar.

2.	I Gede Agus	"Pengaruh Good	Metode	Berdasarkan hasil
	Sudiarsana	Governance dan	purposive	analisis, diketahui
	Putra dan I	Sistem	sampling.	bahwa <i>Good</i>
	Made Pande	Pengendalian Intern	Pengumpulan	Governance dan
	Dwiana	Pemerintah Pada	data dilakukan	Sistem
	Putra (2018)	Kinerja Pemerintah	dengan	Pengendalian
		Daerah"	menyebarkan	Intern Pemerintah
			kuesioner dan	memiliki pengaruh
			teknik analisis	positif pada
			dengan teknik	Kinerja
			analisis regresi	Pemerintah
	- 4	1 1 1	linear	Kabupaten
	41		berganda	Karangasem.
3.	Muhammad	"Pengaruh	Penelitian	Temuan penelitian
	Dahlan , dan	Penerapan Good	menggunakan	menunjukkan
	Asep	Governance	metode	bahwa tidak ada
	Sumaryana	Terhadap Kinerja	eksplanatori	hubungan antara
	(2017)	Pelayanan Publik		kinerja unit
		Budaya Organisasi	~	pelayanan publik
	UIN	Dan Lingkungan	N AM	dengan penerapan
	C II	Eksternal Sebagai	2 A 3	Good Governance
	3 0	Pemoderasi") /\	yang dimoderasi
				oleh budaya
				organisasi atau
				lingkungan
				eksternal.
4.	Dariana dan	"Pengaruh	metode sampel	Temuan penelitian
	Annisa	Penerapan	jenuh,	ini menunjukkan
	Meidyaroza	Akuntabilitas	Penelitian ini	bahwa kinerja

	Harrie	Keuangan,	menggunakan	instansi
	(2020)	Pemanfaatan	model analisis	pemerintah (Good
		Teknologi	regresi linear	Governance) pada
		Informasi,	berganda.	organisasi
		Kompetensi		perangkat daerah
		Aparatur		di Kabupaten
		Pemerintah Dan		Bengkalis secara
		Ketaatan Peraturan		signifikan
		Perundangan		dipengaruhi oleh
		Terhadap Kinerja		akuntabilitas
		Instansi Pemerintah		keuangan,
	1	(Good Governance)		penggunaan
	4	Pada O <mark>rg</mark> anisasi		teknologi
		Perang <mark>k</mark> at Daerah		informasi,
		Kabup <mark>aten </mark>		keterampilan
		Bengkalis"		aparatur
				pemerintah
				daerah, dan
				kepatuhan
				terhadap peraturan
	UIN	SUNAI	N AM	perundang-
	CII	D A I	2 A 7	undangan.
5.	Azza Kasni,	"Pengaruh	Data yang	Temuan
	Afrizal, dan	Independensi,	digunakan	menunjukkan
	Ilham	Komitmen	dalam	bahwa dedikasi
	Wahyudi	Organisasi Dan	penelitian	organisasi auditor
	(2018)	Pemahaman Good	adalah data	dan karakteristik
		Governance	ordinal yang	independen
		Terhadap Kinerja	dikumpulkan	sebagian memiliki
		Auditor (Studi Pada	melalui	dampak yang baik
		Badan Pengawas	penyebaran	dan signifikan
		L		

		Keuangan Dan	kuesioner dan	terhadap kinerja
		Pembangunan	diubah	mereka, sementara
		Perwakilan	menjadi data	kesadaran mereka
		Provinsi Jambi)"	interval	tentang tata kelola
		,	dengan	pemerintahan yang
			menggunakan	baik sebagian
			metode MSI.	tidak berdampak.
				Sedangkan yang
				juga berpengaruh
				baik dan
				signifikan
	- 4	1 / 1 / 1		terhadap kinerja
	4			auditor adalah
				faktor
				independensi
				auditor, komitmen
				organisasi, dan
				pengetahuan tata
				kelola
				pemerintahan yang
	UIN	SUNAI	N AM	baik.
6.	I Putu Nata	"Pengaruh	Penelitian ini	Hasil analisis data
	Pratama dan	Efektivitas Sistem	menggunakan	dan pengujian
	Ni Luh Sari	Informasi	pendekatan	hipotesis
	Widhiyani	Akuntansi,	kauntitatif	menunjukkan
	(2021)	Implementasi Good	asosiatif.	bahwa ada
		Governance dan		pengaruh positif
		Budaya Organisasi		dari efektivitas
		Terhadap Kinerja		sistem informasi
		Keuangan"		akuntansi,
				implementasi

				Good Governance
				dan budaya
				organisasi
				terhadap kinerja
				keuangan LPD di
				Kota Denpasar.
7.	Faisal	"Peran mediasi	Alat analisis	Hasil dari
	Aprillizar	budaya organisasi	pada penelitian	penelitian ini
	dan	pada pengaruh	menggunakan	adalah
	Iskandarsyah	implementasi	aplikasi SPSS	implementasi EP-
	Madjid	aplikasi Sistem		MIS, Good
	(2023)	Informasi		Governance,
	41	Manaj <mark>em</mark> en Kinerja		budaya organisasi,
		(SIMANJA) dan		dan kinerja
		Good <mark>Governan</mark> ce		berjalan dengan
		terhadap kinerja		baik, implementasi
		organisasi pada		EP-MIS dan Good
		Kantor Budaya dan		Governance
		Pariwisata ACEH"		berpengaruh
				terhadap budaya
	UIN	SUNAI	N AM	organisasi dan
	C II	D A I	2 / 3	kinerja organisasi.
8.	Ari Prabowo,	"Pengaruh	Jenis	Hasil dari
	Surati, dan	penerapan Prinsip	penelitian ini	penelitian ini yaitu
	Mukmin	Good Governance	adalah	membuktikan
	Suryatni	dan kerjasama tim	kuantitatif.	bahwa <i>Good</i>
	(2021)	terhadap kinerja	Pengujian	Governance dan
		organisasi (Studi	hipotesis	teamwork
		pada Kanwil Ditjen	menggunakan	berpengaruh
				positif dan
	l	I .	l .	

		Pajak Nusa	analisis regresi	signifikan
		Tenggara)"	berganda.	terhadap kinerja
				organisasi.
9.	Yesi Mutia	"Kepemimpinan	Penelitian ini	Hasil pengamatan
	Basri,	Transformasional,	menyebarkan	menunjukkan
	Hariadi	Komitmen	kuesioner dan	bahwa
	Yasni, dan	Organisasi, Peran	diolah dengan	kepemimpinan
	Novita	Legislatif dalam	menggunakan	transformasional
	Indrawati	implementasi Good	analisis PLS.	tidak berpengaruh
	(2022)	Governance dan		terhadap Good
		dampaknya		Governance,
	1	terhadap <mark>k</mark> in <mark>er</mark> ja		namun komitmen
	41	pemerintahan desa"		organisasional dan
				peran legislatif
			<u> </u>	terbukti memiliki
				pengaruh yang
				besar terhadap
				implementasi
				Good Governance.
10.	Joni Dwi	"Good University	Penelitian ini	Hasil dari
	Pribadi,	Governance dan	menggunakan	penelitian ini
	Farika	implikasinta	skala likert	menunjukkan
	Nikmah, dan	terhadap kinerja	yang	bahwa <i>Good</i>
	Rizka	organisasi"	kemudian	University
	Rahmawati		disebarkan	Governance
	(2020)		kepada	berpengaruh
			responden dan	positif dan
			diuji dengan	signifikan
			menggunakan	terhadap kinerja
				organisasi.

	analisis SEM	
	PLS.	

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dengan melihat rumusan masalah kerangka konseptual adalah:

2.3.1 Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Menurut World Bank di buku Mardiasmo (2018) pada penelitian (Simbolon, 2022) transparansi, partisipasi, akuntabilitas adalah tiga prinsip panduan tata kelola yang baik. Landasan transparansi adalah kebebasan informasi. Siapapun yang membutuhkan informasi untuk kepentingan umum dapat segera memperolehnya. Partisipasi dipandang sebagai cara masyarakat untuk mengungkapkan tujuannya, yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai titik awal pengambilan keputusan. Akuntabilitas dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab dan dengan mendukung inisiatif pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan sosial. Untuk mengetahui apakah ketiga prinsip tersebut dilaksanakan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari sebuah organisasi sektor publik.

Menurut Dwiyanto (2021) dalam penelitian (Simbolon, 2022) *Good Governance* terbukti mempengaruhi kinerja organisasi sebab untuk menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik di tingkat politik dan administrasi, menerapkan disiplin anggaran, dan untuk membangun kerangka hukum dan politik untuk perluasan bisnis dan kegiatan bisnis, *Good Governance* harus dilaksanakan dengan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab.

Pengaruh stewardship theory pada variabel ini mampu mendeskripsikan adanya Kantor Samsat (steward) sebagai lembaga yang terpercaya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan publik, memenuhi tugas dan kewajibannya secara memadai. Peran Kantor Samsat sebagai steward dalam organisasi publik sangat penting untuk kemampuannya memberikan pelayanan terbaik kepada publik sehingga organisasi atau instansi memiliki reputasi yang baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka di mata publik. Klaim ini sesuai dengan beberapa peneliti diantaranya, (Widasari & Putri, 2018), (Dharu, 2021), (Dariana & Harrie, 2020), (Dahlan & Sumaryana, 2017) dan (Mahadewi & Putri, 2019), yang masing-masing menyebutkan jika Partisipasi mempengaruhi Kinerja Organisasi secara positif dan signifikan, pada penelitian

(Istiqomah, 2017) menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dengan demikian berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka penyusunan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi

2.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Informasi yang sesuai, dan faktual tentang aturan publik dan prosedur yang membentuknya juga dapat dikatakan sebagai transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya publik. Dengan membuat informasi ini dapat diakses, penipuan dan manipulasi data yang hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional dapat dicegah. Pembuat laporan keuangan harus secara transparan untuk mencegah berbagai kecurangan guna membantu pemenuhan otonomi daerah yang baik.

Hubungan antara variabel ini dengan stewardship theory adalah peran Kantor Samsat sebagai steward sebagai lembaga yang terpercaya untuk kepentingan publik untuk saling bekerjasama dan kooperatif dalam suatu organisasi dalam memberikan informasi secara rinci mengenai prosedur, biaya dan kewajiban, mendelegasikan tanggung jawab keuangan kepadanya untuk

mecapai tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan umum tercapai sepenuhnya. Klaim ini didukung oleh penelitian (Dharu, 2021) dan (Fadhila & Nurleli, 2021) yang menyebutkan jika transparansi mempengaruhi kinerja organisasi secara positif sedangkan penelitian (Saribu, 2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi, berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesisi yang dirumuskan adalah:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi

2.3.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Akuntabilitas adalah dasar dari semua proses tata kelola, dan keefektifan proses tersebut bergantung pada yang berkuasa bagaimana mereka dalam memenuhi tanggung jawab terebut, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa otoritas digunakan dengan cara yang bertanggungjawab, etis, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Akuntabilitas dan kinerja organisasi sangat berkaitan. Kinerja Organisasi sangat membantu untuk pengelolaan sumber daya dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah publik sebagai alat untuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk

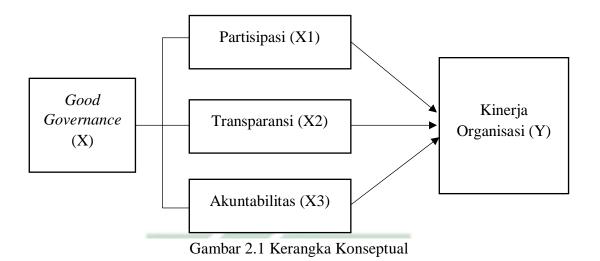
memastikan kinerja organisasi berkualitas tinggi dan dapat dipercaya.

Pada variabel ini *Stewardship in practice theory* didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai steward yang harus mampu memenuhi amanat dan kewajiban yang ditetapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain melayani kepentingan mereka sendiri, komitmen, dan kepercayaan ini juga melayani kepentingan masyarakat. Klaim ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Putri & Putra, 2017) dan (Parenza & Lestari, 2022) yang menyatakan jika akuntabilitas mempengaruhi kinerja organisasi secara positif. Sedangkan pada penelitian (Ulya & Astuti, 2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi dengan melihat penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi

2.4 Kerangka Konseptual

Peneliti memaparkan kerangka konseptual yang mencoba untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebagai berikut :



Menurut gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dihubungkan antara *Good Governance* diterapkan sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku apakah akan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi di Kantor Samsat Kabupaten Bulungan.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif telah digunakan dalam penelitian untuk waktu yang sangat lama dan oleh karena itu dianggap sebagai metode tradisional, pendekatan kuantitatif disebut sebagai pendekatan konvensional. Karena metode ini berdasarkan pada ideologi positivisme, maka metode ini dikenal dengan metode positivistik. Metode kuantitatif merupakan metode ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang rasional, obyektif, sistematis, terukur, dan konkrit. (Sugiyono, 2020).

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan adalah pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan yang beralamat di Jl. Agatish, Tj. Selor Hilir, Tj. Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok hal atau subjek yang didefinisikan secara luas yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, dari mana peneliti dapat menarik kesimpulan (Sugiyono, 2020). Pegawai atau karyawan dari Kantor Samsat Kabupaten Bulungan dan masyarakat (wajib pajak) menjadi populasi penelitian ini.

Menurut (Sugiyono, 2020), "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Teknik yang digunakan

dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersevut memiliki kriteria tertentu (Simbolon, 2022). Kuesioner penelitian ini dibagikan kepada 25 pegawai Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan dan 25 dari masyarakat yang membayar pajak di Kantor SAMSAT kabupaten Bulungan yang memiliki kriteria yaitu:

- pegawai atau karyawan yang bekerja di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan dan masyarakat yang membayar pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.
- 2) Minimal karyawan masa kerja selama 1 tahun.
- 3) Tingkat pendidikan terakhir minimal SMA bagi pegawai atau karyawan yang bekerja pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) adalah dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kinerja organisasi berfungsi sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.

Berbeda dengan variabel independen, yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam hal ini *Good Governance* adalah variabel independen.

3.5 Definisi Operasional

3.5.1.1 Variabel Dependen

A. Kinerja Organisasi

Setiap perusahaan bekerja untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber dayanya sebaik mungkin sambil mempertahankan keberlanjutan organisasi jangka panjang untuk mencapai tingkat kinerja organisasi tertinggi. Artinya tugas atau kewajiban diselesaikan dengan sukses dan efisien serta tetap relevan dengan keinginan semua pemangku kepentingan agar kinerja organisasi dapat tercapai.

3.5.1.2 Variabel Independen

A. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi tanpa pandang bulu.

B. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran
		a. Adanya forum untuk
		menampung partisipasi
		masyarakat yang
	Partisipasi	bersifat terbuka
	(Participation)	terhadap pemerintah
	1 1 1	b. Kemampuan
		masyarakat untuk
		melibatkan dirinya
		dalam membuat
Good Governance		keputusan
(Simbolon, 2022)		a. Memberikan informasi
		rinci tentang proses,
		biaya, dan kewajiban
		b. Kemudahan untuk
UIN S	SUNAN	mengakses suatu
CII	D A D	informasi bagi yang
3 0	KAD	membutuhkan
		c. Membuat proses
		pengaduan jika hukum
	Transparansi	dilanggar atau kasus
	(Transparency)	suap
		d. Bekerja sama dengan
		media dan organisasi
		non-pemerintah untuk

			meningkatkan arus
			informasi.
		a.	Proses pembuatan
			keputusan yang dibuat
			tertulis dan tersedia
	Akuntabilitas		bagi yang membutuhka,
			,
	(Accountability)		memenuhi standar
			etika dan nilai-nilai
			yang berlaku
	/ A	b.	Menyampaikan
4			pertanggungjawaban
			atas suatu keberhasilan
			atau kegagalan misi
		7	suatu organisasi dalam
			mencapai tujuan,
			contoh
			yaitu seperti LAKIP
			(Simbolon, 2022)
		a.	Mengukur tingkat
UINS	SUNAN	$A\Lambda$	efisiensi
CII	D A D	b.	Mengukur tingkat
3 0	K A D	11	pelayanan organisasi
			publik
Kinerja Organisasi		c.	Menyusun agenda dan
(Dwiyanto, 2014)			prioritas layanan
		d.	Mengenali kebutuhan
			masyarakat

e.	Mengembangkan
	program sesuai
	kebutuhan masyarakat
f.	Pelaksanaan kegiatan
	organisasi dilakukan
	dengan menerapkan
	prinsip administrasi
	yang baik
g.	Kegiatan organisasi
	dilakukan dengan
	kebijakan organisasi
	(Dwiyanto, 2014)

Skala Likert merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran indikasi. Skala Likert adalah skala yang paling sering digunakan dalam survei dan kuesioner.

Tabel 3.2 Skala Likert

Kategori Jawaban	Skor		
Sangat Setuju (SS)	N AMPEL		
Setuju (S)	BAYA		
Kurang Setuju (KS)	3		
Tidak Setuju (TS)	2		
Sangat Tidak Setuju (STJ)	1		

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6.2 Sumber data

A. Data Primer

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Tanggapan dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden dan tanggapan tersebut merupakan sumber data utama penelitian ini.

B. Data sekunder

Data dari buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, dokumen dan situs resmi Kantor Samsat Kabupaten Bulungan digunalan sebagai sumber data sekunder.

an ampel

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penyebaran angket, yang mana menjadi metode utama untuk pengumpulan data. Kuesioner yang dibagikan menanyakan pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap kinerja organisasi pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan. Kuesioner dibagikan kepada karyawan atau staff yang bekerja pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Pengujian ini berfungsi untuk mengukur instrumen dalam penelitian untuk mengevaluasi instrumen sebelum dianggap valid. Jika r hitung melebihi r tabel, instrumen tersebut dianggap sah. Uji validitas dilakukan dengan menggunalan program SPSS.

B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur variabel penelitian apakah dapat diandalkan. Jika jawaban atas pertanyaan konsisten, item kuesioner dianggap dapat diandalkan. Item dalam kuesioner dikatakan deliabel jika nila Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika kurang dari 0,60 (Imam, 2018).

3.8.2 Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji ini berfungsi untuk memastikan normalitas variabel campuran dalam model regresi. Uji-t dan uji-F, mengandaikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-V) menentukan apakah data residual berdistribusi normal jika nilai Asymp-Sig lebih besar dari 0.05 (5%) (Imam, 2018).

B. Uji Multikolonieritas

Pengujian ini berfungsi untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara variabel independen, pengujian ini akan dilakukan. Toleransi digunakan untuk menilai variasi variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF=1/toleransi. Nilai tolerasi 0,10 merupakan nilai cutoff yang sering digunakan untuk multikolinearitas (Imam, 2018).

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastititas bertujua untuk mengetahui apakah varian dari residual dalam model regresi terdistribusi di antara dua atau lebih pengamatan. Apabila nilai probabilitas signifikan dan tingkat kepercayaan > 5% maka data dikatakan heteroskedastisitas (Imam, 2018).

3.8.3 Uji Hipotesis

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran secara jelas bagaimana pengaruh faktor-faktor variabel bebas terhadap variabel terikat (Imam, 2018).

Persamaan untuk analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Organisasi

 α : Konstanta

β1X1 : Partisipasi

β2X2 : Transparansi

β3X3 : Akuntabilitas

B. Uji-T

Untuk memahami dampak berbeda dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat menerapkan uji-t. Mencocokkan angka T dengan tabel T akan memberikan jawaban. Dengan ketetapan seperti berikut ini (Imam, 2018):

H0 ditolak dan H1 disetujui, apabila T_{hitung} melebihi T_{tabel} , H0 disetujui dan H1 ditolak apabila T_{hitung} kurang dari T_{tabel}

C. Uji-F

Dengan menggunakan uji F, dapat diketahui apakah variabel bebas (X1, X2, X3) memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel terikat (Y) atau tidak. Uji F dapat diktehui dalam keadaan sebagai berikut (Imam, 2018):

F hitung > F tabel maka H0 diterima

F hitung < F tabel maka H0 ditolak.

D. R-Squared (R^2)

Intinya, koefisien determinasi (R2) berperan sebagai alat ukur model regresi untuk menjelaskan variasi variabel

terikat. Koefisien (R2) memiliki nilai 0-1. Artinya apabila koefisien R2 memiliki nilai kecil, maka terdapat keterbatasan kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Hampir semua variabel independen memenuhi persyaratan untuk menggambarkan fluktuasi variabel dependen jika nilainya mendekati 1 (Imam, 2018).

Nilai koefisien 0 menunjukkan tidak ada hubungan, 0-0,49 menunjukkan korelasi lemah, 0,50 menunjukkan korelasi sedang, 0,51-0,99 menunjukkan korelasi tinggi, dan 1 menunjukkan hubungan terkuat (korelasi sempurna). Nilai R2 yang rendah berarti kemampuan faktor independen untuk menjelaskan variabel dependen relatif terbatas.. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen disediakan oleh variabel independen.

Rumus Koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

 $KD = R^2 \times 100\%$

Keterangan:

KD : besarnya koefisien penentu (determinan) dan

R² : merupakan koefisien korelasi

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Unit pelaksana Badan Pengelola Pajak dan Rehabilitasi daerah bulungan Kalimantan Utara atau yang dapat disingat dengan UPT. BPPRD daerah Bulungan dulunya merupakan organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Satuan Pelayanan Pendapatan Sementara Kalimantan Timur yang disingkat UPTD. Pembentukan sengketa UPTD yang berkedudukan di kabupaten didasarkan pada peraturan daerah Kalimantan Timur No. 03 tahun 1985 tanggal 12 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Gubernur H. Soewandi Roestam dengan masa jabatan dari tahun 1983 sampai dengan 1988.

UPTD Bulungan didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 yang awalnya berada di bawah cabang sengketa berkedudukan di Tarakan, pada tanggal 20 - 4 Mei UPTD Bulungan tidak lagi berada di bawah tanggung jawab UPTD Dispenda Tarakan, sejak awal tahun 2005 naungan UPTD mengatakan ini sebagaimana diberi wewenang, UPTD Seluruhnya mengatur pendapatan dan pengeluaran secara keseluruhan, demikianlah keberadaan UPTD itu setara dengan UPTD lain pada provinsi Kalimantan di bawah kantor dinas Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Samarinda.

UPTD Bulungan juga memiliki asisten UPT pulau bunyu dan seorang pegawai negeri sipil samsat yang terletak di Pulau Bengkulu.

Sehubungan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang No. 03 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka pada tahun 2015 tanggal 17 Desember UPTD Kantor Wilayah Sumatera Utara bergabung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ini adalah salah satu syarat untuk daerah otonom baru (DOB), yaitu penyerahan termasuk personel, pendanaan, infrastruktur dan dokumen (P3D), semua diserahkan paling lambat 3 tahun setelah diangkat menjadi gubernur dan pada tanggal 8 November 2016 serah terima secara resmi dilaksanakan antara pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah provinsi Kalimantan Sumatera Utara. Sejak saat itu UPTD Bulungan telah resmi dibentuk dan 4 UPTD Kabupaten / kota lain yaitu UPTD Tarakan, UPTD Nunukan, UPTD Malinau dan UPTD KTT bergabung dengan pemerintahan di provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2016, seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komando provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan Gubernur di Sumatera Utara No. 22 tahun 2016 tentang Organisasi dan Prosedur Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2016 tentang Tata Kelola Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi Kalimantan Utara, yaitu UPTD Sengketa Bulungan dan 4 UPTD Kabupaten/kota lain diubah menjadi UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bulungan.

UPT BPPRD menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan perencana dan pengembangan perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan program berjalan dengan baik dan teratur. Apapun struktur organisasi UPT Badan para pengelola pajak dan retribusi di provinsi uatara Kalimantan.

4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Janji Organisasi

4.1.2.1 Visi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

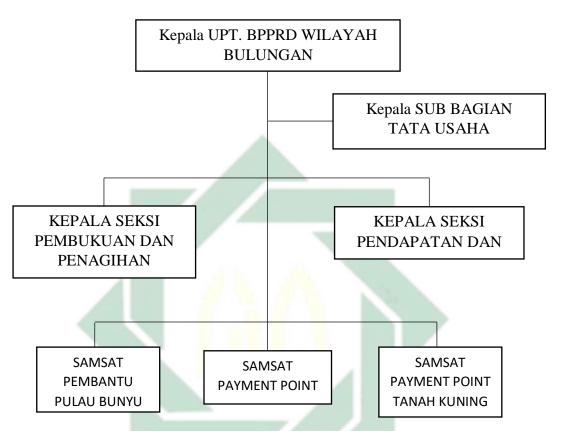
Terwujudnya Pelayanan Prima berbasis Teknologi Informasi secara Transparan dan Akuntabel demi Kepuasan Masyarakat menuju Pemerintah yang Bersih.

4.1.2.2 Misi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

- a) Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat wajib pajak, wajib retribusi dan wajib bayar pendapatan lain lainnya.
- b) Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat wajib
 pajak dalam pengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan

- (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara cepat, Transparan dan Akuntabel.
- Menyelenggarakan tertib Administrasi Dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
- d) Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan kendaraan bermotor.
- e) Melakukan upaya meningkatkan untuk layanan melalui perbaikan sarana prasarana, system metode dengan komputerisasi serta mengembangkan Sumber Daya Manusia.
- **4.1.2.3 Motto Layanan Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan** Keputusan Anda Merupakan Citra Pelayanan Kami.
- **4.1.2.4 Janji Layanan Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan** Melayani secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan kepada staff atau pegawai yang bekerja pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 – 5 Maret 2023. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 kuesioner dan yang kembali sebanyak 50 kuesioner atau sama dengan 100% presentase.

Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Staff/Pegawai	Presentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	50	100%
2	Jumlah kuesioner yang kembali	50	100%
3	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	50	100%

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah staff atau pegawai pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan, yang dimana diperoleh responden berjumlah 50 yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Karakteristik responden disajikan dalam bentuk penggolongan seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Untuk penjelasan menganai karakteristik tersebut dapat diketahui pada diagram berikut:

Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	30	60%
2.	Perempuan	20	40%

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Tabel di atas mengilustrasikan distribusi jenis kelamin responden penelitian yang menunjukkan 30 responden laki-laki dengan persentase 60%. Kemudian sebanyak 20 individu yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan, dengan persentase total

40%. Dengan demikian, terlihat bahwa responden yang mengisi kuesioner tersebut sebagian besar laki-laki.

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Frekuensi	Persentasi
1.	< 20 Tahun	0	0
2.	20-29 Tahun	12	24%
3.	30-39 Tahun	20	40%
4.	40-49 Tahun	17	34%
5.	> 50 Tahun	1	2%

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden berusia 20-29 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 24%, diikuti responden berusia 30-39 tahun sebanyak 20 orang dan persentase 40%, responden berusia 40-49 tahun sebanyak 17 orang dan persentase sebesar 34%, responden berusia 50 tahun ke atas hanya 1 orang dengan persentase 2%, dan responden berusia 20 tahun ke bawah dengan jumlah 0 responden.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk menganalisis data. Deviasi standar, mean (rata-rata), nilai maksimum, dan nilai minimum digunakan dalam statistik

deskriptif. Hasil dari analisis statistik deskriptif adalah seperti berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi	50	3	11	5.44	1.798
Transparansi	50	4	9	5.74	1.676
Akuntabilitas	50	4	11	6.56	1.809
Kinerja Organisasi	50	9	23	14.48	3.501
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahaui bahwa jumlah staff/pegawai pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan sebanyak 50 responden. Kemudian untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja organisasi yang memiliki nilai maksimum 23 dan nilai minimum 9, dengan nilai rata-rata 14,48, dan standar deviasi sebesar 3,501.

kemudian variabel independen pada penelitian ini yaitu *Good Governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Variabel partisipasi memiliki nilai maksimum 11 dan minimum 3, dengan nilai rata-rata 5,44 serta standar deviasi sebesar 1.798. Selanjutnya variabel transparansi memiliki nilai maksimum 9, lalu minimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata 5,74 dan standar deviasi sebesar 1.676. Kemudian yang terakhir variabel akuntabilitas

memiliki nilai maksimum sebesar 11, nilai minimum 4, dengan nilai rata-rata 6,56, dan standar deviasi sebesar 1.809.

4.3.2 Uji Validitas Product Moment

Uji validitas sebagaimana dijelaskan pada bab 3 adalah uji yang mencoba mengevaluasi instrumen penelitian yang sudah ada hingga dianggap valid. Jika r hitung melebihi r tabel, instrumen dianggap valid. Dengan menggunakan program SPSS dilakukan uji validitas.

Melalui nilai koefisien korelasi antara hasil skor item pernyataan dengan skor keseluruhan, digunakan metode statistik untuk mengevaluasi validitas suatu alat ukur. Jika korelasi r hitung lebih tinggi pada tingkat signifikansi 0,05% atau 5%, instrumen dianggap asli. Sebanyak 50 responden pegawai dan masyarakat yang membayar pajak kendaraan di Kantor Samsat Kabupaten Bulungan mengikuti survei tersebut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
	X1.1	0,620	0.279	Valid
Partisipasi (X1)	X1.2	0,628	0.279	Valid
	X1.3	0,600	0.279	Valid
Transparansi	X1.4	0,630	0.279	Valid
(X2)	X1.5	0,648	0.279	Valid

	X1.6	0,712	0.279	Valid
	X1.7	0,673	0.279	Valid
	X1.8	0.638	0.279	Valid
Akuntabilitas	X1.9	0,724	0.279	Valid
(X3)	X1.10	0,515	0.279	Valid
	X1.11	0,716	0.279	Valid
	Y.1	0,691	0.279	Valid
	Y.2	0,642	0.279	Valid
- 4	Y.3	0,779	0.279	Valid
Kinerja	Y.4	0,771	0.279	Valid
Organisasi (Y)	Y.5	0,746	0.279	Valid
	Y.6	0,669	0.279	Valid
	Y.7	0,810	0.254	Valid
	Y.8	0,660	0.279	Valid
TITAL	Y.9	0,722	0.279	Valid

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil perhitungan data kuesioner yang telah diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS bahwa dari setiap indikator masing-masing yang diberikan kepada 50 orang responden dengan butir pertanyaan berjumlah 11 bernilai positif menunjukkan r hitung > r tabel pada taraf 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pertanyaan untuk variabel Partisipasi, Transparansi

dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan valid atau layak digunakan sebagai tolok ukur kajian, dan dapat digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut.

4.3.3 Uji Reliabilitas

Pengujian ini berfungsi untuk menentukan apakah variabel penelitian dapat diandalkan. Jika tanggapan konsisten, item kuesioner dianggap dapat diandalkan. Item dalam survei dianggap andal jika Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 dan tidak andal jika kurang dari 0,60.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items	
.699		3

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Setiap variabel pada Tabel 4.6 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,699 > 0,60 dan menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat dipercaya atau sangat baik. sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan untuk membentuk Partisipasi (X1) menunjukkan atau memenuhi syarat dapat diandalkan.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	4

Setiap variabel pada Tabel 4.7 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,819 > 0,60 dan menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat dipercaya atau sangat baik. sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan untuk membentuk Transparansi (X2) menunjukkan atau memenuhi syarat dapat diandalkan.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X3)

Cronbach's Alpha	N of Items	
.811	/	4

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Setiap variabel pada Tabel 4.8 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,811 > 0,60 dan menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat dipercaya atau sangat baik. sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan untuk membentuk Akuntabilitas (X3) menunjukkan atau memenuhi syarat dapat diandalkan.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	9

Setiap variabel pada Tabel 4.9 memiliki skor *Cronbach's Alpha* sebesar 0,883 > 0,60 dan menunjukkan bahwa variabel tersebut reliabel atau sangat baik. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah semua pertanyaan yang dipakai untuk membuat Kinerja Organisasi (Y) menunjukkan reliabilitas atau dapat diandalkan.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menilai apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov Test (K-S) dapat digunakan untuk mengetahui normalitas data dalam penelitian. Jika nilai signifikansi K-S kurang dari 5% atau 0,05 maka data dianggap berdistribusi teratur.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Komlogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	

	Std.	2.00890193
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.072
	Negative	097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Asymo.Sig.(2-tailed) dalam Uji *One Sample Komlogorov-Smirnov* bernilai 0,200, menurut tabel di atas. Karena nilai signifikansi adalah 0,200 > 0,05, maka residualnya terdistribusi secara teratur. Oleh karena itu, asumsi kenormalan data adalah benar.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Tingkat toleransi dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada tabel selanjutnya menjadi bukti adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		
TITALC	Tolerance	VIF	
(Constant)	UNAINA	MLEL	
Partisipasi	.766	1.305	
Transparansi	.628	1.592	
Akuntabilitas	.667	1.498	

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

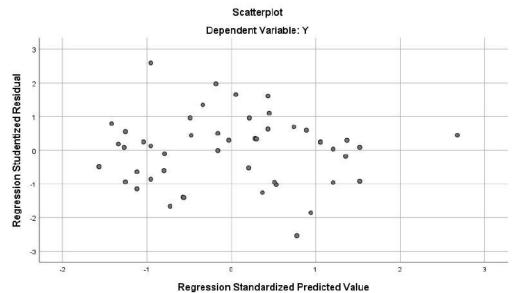
Dengan melihat tabel tersebut, bisa diketahui jika variabel partisipasi memiliki nilai tolerance = 0,766 dan VIF = 1,305, nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Selanjutnya nilai tolerance pada variabel transparansi sebesar 0,628 yang menunjukkan nilai

tolerance > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,592 < 10,00. Kemudian yang terakhir untuk variabel Akuntabilitas memiliki nilai tolerance sebesar 0,667 dan nilai VIF sebesar 1,498 yang menyatakan bahwa nilai tolerance pada variabel akuntabilitas > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Sehingga, variabel partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak terjadi multikolonieritas.

4.4.3 Heteroskedastisitas

Uji ini mencari residual, varian, dan ketidaksetaraan dari satu observasi ke observasi berikutnya dalam model regresi. Jika varian residu antara satu pengamatan dan pengamatan berikutnya tidak berubah, fenomena tersebut disebut sebagai homoskedastisitas, jika mengalami perubahan, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Homoskedastisitas adalah model regresi yang berguna. Analisis didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Ketika pola tertentu, seperti titik (titik) yang membentuk pola teratur (bergelombang, membesar, lalu menyempit) terjadi, maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang terlihat dan titik-titik berjarak sama di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4. 2 Grafik Scaetterplot

Pola di atas menunjukkan pola titik-titik berserakan dan berkabut di area sekitar 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model penelitian regresi tidak bermasalah dengan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat melalui tabel hasil uji:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.015
Partisipasi	.973
Transparansi	.844
Akuntabilitas	.770

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Variabel partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tidak menunjukkan heteroskedastisitas seperti terlihat pada tabel di atas, dimana nilai tanda ketiga variabel semuanya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,973 untuk variabel partisipasi, 0,844 untuk transparansi, dan 0,770 untuk akuntabilitas .

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Linear Berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependen (Y) dapat dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda.

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	$A \blacksquare$		Colline Statist	-
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.456	1.280		1.919	.061		
	Partisipasi	.430	.188	.221	2.286	.027	.766	1.305
	Transparansi	.656	.223	.314	2.944	.005	.628	1.592
	Akuntabilitas	.902	.200	.466	4.499	.000	.667	1.498

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.13, dapat disimpulkan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \epsilon$$

$$Y = 2.456 + 0.430 + 0.656 + 0.902 + e$$

a. Nilai positif dari konstanta adalah 2.456. menunjukkan kekuatan dampak masing-masing variabel independen

- terhadap variabel dependen. Nilai kinerja organisasi sebesar 2,456 jika variabel independen tetap konstan.
- b. Berdasarkan nilai koefisien partisipasi, jika semua faktor lainnya tetap konstan, maka peningkatan partisipasi sebesar satu satuan akan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi sebesar 0.430.
- c. Berdasarkan nilai koefisien transparansi, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap, peningkatan transparansi satu satuan akan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi sebesar 0,656.
- d. Berdasarkan nilai koefisien akuntabilitas, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap, peningkatan transparansi satu satuan akan menghasilkan peningkatan sebesar 0,902.

Temuan model regresi penelitian adalah bahwa efektivitas organisasi berkorelasi langsung dengan variabel keterlibatan (X1), transparansi (X2), dan tanggung jawab (X3). Ini berarti bahwa jika variabel bebas naik, variabel terikat mungkin juga naik.

4.5.2 Uji T

Uji-t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen diuji pada taraf signifikan 0,05 dengan menunjukkan sejauh mana satu variabel independen mempengaruhi satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan

variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai pembuktian apakah variabel Partisipasi (X1), Transparansi (X2) dan Akuntabilitas (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Organisasi (Y). Dengan ketetapan sebagai berikut ini:

H0 ditolak dan H1 disetujui, jika T hitung melebihi T tabel,

H0 disetujui dan H1 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel

Tabel 4.14 Hasil Uji T

Model		Unstandardized		Standardizied		
		Coefficient		Coefficient	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.4 <mark>5</mark> 6	1.280		1.919	.046
	Partisipasi	.430	.188	.221	2.286	.027
	Transparansi	.656	.223	.314	2.944	.005
	Akuntabilitas	.902	.200	.466	4.499	.000

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikasi variabel partisipasi = 0.027 < 0.05 dan t hitung pada tabel hasil Uji T Coefficients = 2.286 > 2.0117, sehingga kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, artinya partisipasi mempenaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan. Selanjutnya untuk variabel transparansi hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikasi = 0.005 < 0.05 dan t hitung pada tabel hasil Uji T Coefficients = 2.944 > 2.0117, sehingga kesimpulan yang diambil

adalah H0 ditolak dan H1 diterima, artinya transparansi mempenaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan. Kemudian variabel akuntabilitas hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikasi = 0,00 < 0,05 dan t hitung pada tabel hasil Uji T Coefficients = 4.499 > 2.0117, sehingga kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti akuntabilitas mempenaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan. Dengan demikian dapat diketahui bawah variabel Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan.

4.5.3 Uji F

Pengaruh gabungan variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y) diuji dengan uji F. Uji F dapat diktehui dalam keadaan sebagai berikut (Imam, 2018):

F hitung > F tabel maka H0 diterima

F hitung < F tabel maka H0 ditolak.

Tabel 4.15 Hasil Uji F

		Sum of		Mean		
	Model	Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	402.731	3	134.244	31.228	.000 ^b
	Residual	197.749	46	4.299		
	Total	600.480	49			

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Dengan melihat Tabel 4.15 di atas, dapat dilihat jika Variabel Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi Kantor Samsat Kabupaten Bulungan secara positif dan signifikan, dimana diketahui nilai signifikansi variabel Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas adalah 0,000 < 0,05 dan F hitung pada tabel hasil uji F sebesar 31,288 > 2.81 yang dapat dikatakan bahwa H0 ditolak.

4.5.4 Uji koefisien Determinasi (R²)

Persentase koefisien determinasi menyatakan tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel output koefisien determinasi yang dibuat dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary								
			Adjusted R	Std. Error of				
Model	R	R Square	Square	the Estimate				
	.819ª	.671	.649	2.07338				

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.16, seperti yang dapat diamati, koefisien korelasi adalah senilai 0,812. Dengan demikian, rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung koefisien determinasi:

 $KD = R^2 \times 100\%$

 $KD = (0.819)^2 \times 100\%$

KD = 67,1%

Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 67,1%, dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi Kantor Samsat Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh tata kelola yang sangat baik sebesar 67,1%, sisanya sebesar 32,9% disumbangkan oleh faktor lain.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Part<mark>is</mark>ip<mark>asi terhad</mark>ap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi terbukti mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan. Partisipasi dimaksudkan agar karyawan akan dilatih untuk bekerja lebih baik. Konsep partisipasi dapat mendorong karyawan untuk lebih termotivasi dalam bekerja, dapat membimbing karyawan untuk berorientasi pada hasil kerja yang sangat baik, dan dapat mengarahkan karyawan untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Partisipasi merupakan landasan evaluasi proses kerja dalam rangka mendorong kinerja pegawai yang efektif dan efisien.

Temuan studi yang diperoleh dengan membandingkan sebaran tanggapan responden dengan data observasi menunjukkan bahwa Kantor Samsat melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Upaya ini akan dimanfaatkan oleh Kantor Samsat Kabupaten Bulungan dengan adanya akses fasilitas atau media untuk menerima masukan, kritik, dan rekomendasi dari masyarakat setempat. Kantor Samsat Kabupaten Bulungan memberikan kesempatan untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat melalui penggunaan konsep partisipasi. Tempat keterlibatan masyarakat disediakan oleh ide-ide media yang mengikuti prinsip partisipasi, namun masih perlu adanya pembenahan dimana dibutuhkan fasilitas fisik seperti kotak saran yang tersedia pada kantor tersebut untuk menampung aspirasi berupa saran hingga kritik masyarakat. Dengan bantuan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan dan saran yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Samsat untuk dipertimbangkan dan dikaji.

Pengaruh *stewardship theory* pada variabel partisipasi mampu mendeskripsikan adanya Kantor Samsat (*steward*) sebagai lembaga yang terpercaya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan publik, memenuhi tugas dan kewajibannya secara memadai. Peran Kantor Samsat sebagai *steward* dalam organisasi publik sangat penting untuk kemampuannya memberikan

pelayanan terbaik kepada publik sehingga organisasi atau instansi memiliki reputasi yang baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka di mata publik. Klaim ini sesuai dengan beberapa peneliti diantaranya, (Widasari & Putri, 2018), (Dharu, 2021), (Dariana & Harrie, 2020), (Dahlan & Sumaryana, 2017) dan (Mahadewi & Putri, 2019), yang masing-masing menyebutkan jika Partisipasi mempengaruhi Kinerja Organisasi secara positif dan signifikan.

4.6.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi terbukti mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan. Sebab, Kantor Samsat akan terlihat maksimal jika transparansi diterapkan. Selain itu, tekanan pada personel kantor samsat akan timbul akibat pengawasan dan evaluasi publik untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka, dengan kata lain, semakin transparan personel Kantor Samsat, semakin baik pula operasional lembaga tersebut.

Berdasarkan temuan studi tersebut, Dinas Samsat Kabupaten Bulungan mempublikasikan seluruh programnya secara online agar semua orang dapat mengakses informasi tersebut. Prinsip transparansi mencakup baik anggaran maupun pelaksanaan program, selain terbuka dalam pelaksanaan program. Kantor Samsat Kabupaten Bulungan telah menyusun anggarannya dalam sebuah dokumen. Agar masyarakat umum mengetahui tentang anggaran

yang telah dibuat, laporan tersebut juga dimuat di website resmi. Hal tersebut dilakukan karena transparansi anggaran merupakan suatu hal sangat penting, terutama untuk menghindari persepsi masyarakat yang buruk. Sehingga penyediaan informasi yang akurat tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, keuangan dan tanggung jawab dapat dilihat di website yang sudah disediakan. Dengan adanya subdomain ini, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai Kantor Samsat Kabupaten Bulungan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan hubungan antara variabel transparansi dengan stewardship theory adalah peran Kantor Samsat sebagai steward sebagai lembaga yang terpercaya untuk kepentingan publik untuk saling bekerjasama dan kooperatif dalam suatu organisasi dalam memberikan informasi secara rinci mengenai prosedur, biaya dan kewajiban, mendelegasikan tanggung jawab keuangan kepadanya untuk mecapai tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan umum tercapai sepenuhnya. Klaim ini didukung oleh penelitian (Dharu, 2021) dan (Fadhila & Nurleli, 2021) yang menyebutkan jika transparansi mempengaruhi kinerja organisasi secara positif.

4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja organisasi, karena

setiap instansi pemerintah termasuk Kantor Samsat Kabupaten Bulungan mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan mampu mempresentasikan dan menjelaskan segala hasil program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara efisien. Karena telah dibuktikan bahwa akuntabilitas berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, maka Kantor Samsat akan bekerja lebih baik dengan semakin efektifnya akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil temuan penelitian menunjukkan jika hasil yang didapat mendukung teori stewardship. Berdasarkan hasil uji data di atas yang menjelaskan Stewardship in practice theory didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai steward yang harus mampu memenuhi amanat dan kewajiban yang ditetapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain melayani kepentingan mereka sendiri, komitmen, dan kepercayaan ini juga melayani kepentingan masyarakat. Peran Kantor Samsat sebagai steward dalam organisasi publik sangat penting untuk kemampuannya memberikan pelayanan terbaik kepada publik sehingga organisasi memiliki reputasi yang baik dan bertanggung

jawab atas pekerjaan mereka di mata publik. Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan telah memberikan pertanggungjawabannya dalam penelitian ini karena menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak pada kinerja organisasi. Klaim ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Putri & Putra, 2017) dan (Parenza & Lestari, 2022) yang menyatakan jika akuntabilitas mempengaruhi kinerja organisasi secara positif.

Oleh karena itu, hipotesis yang ada dinyatakan diterima, yaitu "Good Governance" berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan". Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis bahwa Good Governance mempengaruhi Kinerja Kantor Samsat Kabupaten Bulungan secara positif dan signifikan. Hal ini memberikan informasi kepada Kantor Samsat Kabupaten Bulungan bahwa Good Governance berdampak pada bagaimana kinerja Kantor Samsat Kabupaten Bulungan, sehingga perlu adanya berkonsentrasi lebih pada hal tersebut.

Selain itu, dapat disimpulkan dan dipahami dari sejumlah teori dan temuan studi empiris (penelitian yang relevan) bahwa implementasi *Good Governance* akan memberikan efek positif yang paling besar ketika para pelaku kebijakan mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Seorang pegawai atau karyawan harus selalu menjaga perilaku dalam menjalankan tugas, memenuhi kewajibannya, dan bertindak sesuai

dengan kewenangannya. Hal ini tentu saja akan membantu mewujudkan lebih jauh prinsip-prinsip *Good Governance* yang diperlukan dalam praktik pelayanan publik



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti merumuskan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa pelaksanaan *Good Governance* pada prinsip partisipasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan. Hasil analisis uji T *Coefficient* juga menunjukkan variabel partisipasi sebesar 2.286 > 2.0117 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, artinya partisipasi mempengaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan.
- 2. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa pelaksanaan *Good Governance* pada prinsip transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan. Hasil analisis uji T *Coefficient* menunjukkan variabel transparansi sebesar 2.944 > 2.0117 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, artinya transparansi mempengaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan.
 - 3. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa pelaksanaan *Good Governance* pada prinsip akuntabilitas memiliki pengaruh yang

positif terhadap kinerja organisasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan. Hasil analisis uji t *coefficient* menunjukkan variabel akuntabilitas sebesar 4.499 > 2.0117 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, artinya akuntabilitas mempengaruhi kinerja organisasi secara positif dan signifikan.

5.2 Saran

Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan untuk menunjang prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan hendaknya memperbaiki kelemahan yang masih ada pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan yaitu pada indikator Partisipasi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan tidak hanya dilihat dari sebatas sebagai keterlibatan saja, namun Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan harus lebih melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pajak kendaraan. Kemudian pada indikator Transparansi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan agar lebih banyak menampung aspirasi dari masyarakat melalui media massa atau publik, serta dapat memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan data tersebut. Selanjutnya untuk indikator akuntabilitas membuktikan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai dan masih belum optimal dalam melakukan kinerjanya terhadap publik, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja organisasi Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan yang masih harus diperbaiki untuk

meningkatkan mutu kualitas indikator kinerja tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, karena adanya tuntutan publik kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan *Good Governance*, penelitian kinerja pegawai di Kantor Samsat Kabupaten Bulungan menjadi penting untuk dipahami. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya pada Pemerintah Kota/Kabupaten lain yang memiliki pegawai yang kinerjanya belum maksimal dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Selain *Good Governance*, peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang menentukan kinerja pegawai. Topik penelitian tidak hanya dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulungan agar temuan penelitian dapat diterapkan secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi pada Kantor Kecamatan Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 283–295.
- Alamsyah, S. M. (2018). Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi (studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi). skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Anggraini, A. B., & Idayati, F. (2022). Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10), 1–18.
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik (S. B. Sartika (ed.)). UMSIDA Press.
- Dahlan, M., & Sumaryana, A. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Unit Pelayanan Publik, Dan Budaya Organisasi Dan Lingkungan Eksternal Sebagai Moderating Variable. Sosiohumaniora, 19(1), 45–51.
- Dariana, & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS* (*Jurnal Akuntansi Syariah*), 4(1), 124–139.
- Dharmawan, T., & Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(1), 941–948.
- Dharu, H. S. D. (2021). Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi dan Pengawasan Inetrnal Terhadap Kinerja OPD: Budaya Organisasi sebagai

- Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–25.
- Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik (Cet. 4). Gadjah Mada Univ. Press.
- Fadhila, R., & Nurleli. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Organisasi. *Prosiding Akuntasi*, 7(1), 146–150.
- Imam, G. (2018). Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25 (Ed. 9.; Ce). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istiqomah, N. N. (2017). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Ngawi. Universitas Brawijaya.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kasni, A., Afrizal, & Wahyudi, I. (2018). Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Government Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA*, 3(3), 20–33
- Mahadewi, I. A. A., & Putri, A. D. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 568–593.
- Nurmala Sari, E. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25–54.
- Parenza, R. S., & Lestari, R. (2022). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(2), 1022–1031.

- Putri, N. K. D. Y., & Putra, I. M. P. D. (2017). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(2), 1660–1688.
- Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. mitra wacana media.
- Saribu, A. D. (2017). Prinsip-prinsip Good Government Governance terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Online Internasional & Nasional Media Studi Ekonomi*, 20(1), 91–108.
- Sidara. (2020). Jumlah Kendaraan Bermotor di Kaltara. Sidara. https://sidaracantik.kaltaraprov.go.id/web/artikel/act-baca/29/Jumlah-Kendaraan-Bermotor-di-Kaltara
- Simbolon, adela septiani. (2022). Pengaruh *good government governance* terhadap kinerja organisasi dinas pendidikan kabupaten bogor. Universitas Pakuan, Bogor.
- Sudiarsana, G. A., & Dwiana, I. M. P. (2018). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1720–1743.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.)). Alfabeta, Bandung.
- Sukarta, I. W., Badera, I. D. N., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 06(11), 3917–3950.
- Sunardi, Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governanceterhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 155–166.

Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(2), 63–79.

Widasari, K. I., & Putri, A. D. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(2), 1308– 1334.

